

Analisis Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik

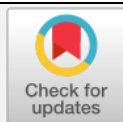
Analia Sofiana¹

¹Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

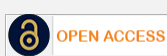
*Koresponden email : analiasofiana12@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 13 Februari, 2023;
Diterima: 14 Februari, 2023;
Dipublikasi: 28 Februari, 2023;



**Copyright © 2023. Owned by
Author(s), published by JSC**

***This is an open-access article.
License: Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
(CC BY-NC-SA)***

How to cite:

Sofian, A. 2023. Analisis Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik. *Journal of Social Contemplativa*. 1(1); 42-50.

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian analisis penerapan open government melalui aplikasi Jakarta kini (Jaki) pada fitur jak-respons dalam penyebaran informasi publik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *open government* dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan indikatornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Jakarta kini (Jaki) Dari segi transparansi dari tindakan pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sudah terbuka secara *default* karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif mempublikasikan data sesuai dengan informasi datayang masuk ke sistem Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang dilakukan oleh perangkat daerah. Selain itu, dalam menjaga data yang bersifat rahasia pengelolaan aplikasi melakukan pengaturan dan pemilahan informasi data pada sistem. Dari segi akses terhadap layanan dan informasi dari Pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) memiliki standar operasional prosedur dalam penyajian data. Selain itu, data yang dapat diakses dengan bebas biaya. Dari segi ketanggapan Pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan keterlibatan warga negara, pengelolaan aplikasi JAKI organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat kebijakan dengan dasar data konkret di lapangan.

Kata kunci: Aplikasi Jaki; *Open Government*; Informasi Publik

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat memungkinkan akses informasi semakin mudah dijangkau oleh publik. Kebutuhan akan informasi pelayanan publik yang mudah diakses saat ini menjadi komponen yang sangat penting bagi perencanaan dan pembangunan di suatu kota dan negara. Kehadiran keterbukaan informasi publik di ranah global kini menjadi hal pokok yang sangat penting bagi pemerintah di suatu negara untuk dilaksanakan dan diupayakan ketersediaannya. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik sendiri merupakan bagian dari gerakan *Open Government Indonesia (OGI)*. *Open Government Indonesia (OGI)* adalah gerakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik, yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan tiga pilar keterbukaan pemerintah, yakni transparansi, partisipasi publik, dan inovasi (Bappenas 2015)

Kehadiran teknologi dan perkembangannya yang semakin meningkat juga mulai dimanfaatkan dalam penyelenggaraan *open government* di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dipergunakan dalam rangka percepatan dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah dan perbaikan pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di ranah pemerintahan diatur melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *electronic government* menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan *open government* yang direalisasikan melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) merupakan pusat informasi dan layanan masyarakat resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Jakarta.

Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) diluncurkan pada tahun 2019 untuk meningkatkan sistem pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi. Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) memiliki beberapa fitur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi seputar Provinsi DKI Jakarta. Adapun fitur tersebut antara lain JakWarta, JakRespons, JakPangan, JakPantau, JakSiaga, JakWifi, Jejak, JakPenda, JakSurvei, JAKISPU dan LaporanVideo. Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) terbentuk karena dilatarelakangi beragam permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta

diantaranya KKN, minimnya transparansi dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) menjadi bagian yang sangat penting karena membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, membantu melawan korupsi dan meningkatkan transparansi. Membuka data pada publik juga membuat Pemerintah menjadi lebih bijak menggunakan sumberdaya yang ada dan akan meningkat pelayanan kepada masyarakat. Data yang ada pada Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dihasilkan dari laporan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) di kelola oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat memantau dan memanfaatkan berbagai layanan informasi dengan mengakses Aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Keterbukaan informasi melalui penyediaan data terbuka dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai alat untuk perbaikan sistem dalam mengawasi tata kelola pemerintahan di provinsi DKI Jakarta.

Namun, pada pelaksanaannya Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) masih belum optimal karena masih terdapat Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menagani pegaduan masyarakat DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan data pada masing-masing organisasi perangkat daerah dan berpengaruh pada ketersediaan kumpulan data di Aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Dewasa ini meningkatnya akses informasi di masyarakat menuntut sebuah sistem yang dinamis dan mudah dipahami. *Open government* (pemerintahan terbuka) menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam upaya membangun gerakan yang lebih terbuka kepada publik dan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mendefinisikan *open government* sebagai transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan (OECD 2016)

Dalam pelaksanaan *open government* untuk melihat transparansi dari tindakan pemerintah, kemudahan terhadap akses layanan dan informasi serta ketanggapan pemerintah dalam merepon ide-ide baru melalui permintaan dan kebutuhan publik sangat memerlukan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapannya. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dianggap krusial dalam mereduksi, tidak hanya struktur pemerintah yang kaku atau berbelit-belit, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kemudahan layanan publik itu sendiri. Layanan yang efisien, secara otomatis juga akan mengurangi biaya prosedural yang kerap memboroskan anggaran pemerintah (Janssen et al. 2012). Dalam penerapannya, *open government* tidak menutup ruang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi karena

mempercepat hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta memberikan kemudahan terhadap akses layanan dan informasi. Oleh pemerintah, *open government* mulai diterapkandengan menggunakan konsep *elektronik*.

Elektronic government (e-government) berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan diantara instansi pemerintahan. Teknologitersebut termasuk *e-mail*, *WAN (Wide Area Networks)*, *Internet*, peralatan *mobile computing* (HP, Laptop, PDA) dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk menyebarkan informasi dan memberi pelayanan elektronik dalam berbagai bentuk (Hardiyansyah 2011). *Open government* yang diterapkan pemerintah juga harus mampu membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat menciptakan inovasi baru diranah transparansi. Gant, Jon, and Tuner-lee (2011) menjelaskan *open government* sebagai pemerintahan yang berinovasi bersama dengan semua orang, terutama warga negara, berbagi sumber yang sebelumnya dijaga ketat (tertutup), memanfaatkan kekuatan kolaborasi massa, mendorong transparansi sepanjang operasinya, dan berperilaku tidak sebagai instansi yang terisolasi berdasarkan yurisdiksi semata, melainkan sebagai sesuatu organisasi yang benar-benar terintegrasi dan berjejaring.

Berdasarkan penjelasan di atas, *open government* memberikan penekanan terhadap karakteristik pemerintahan terbuka yang harus mengacu pada asas transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas dan responsivitas dalam penerapannya. Keterlibatan dan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat menghasilkan kualitas terhadap kebijakan layanan dan informasi. Untuk percepatan tujuan, *open government* banyak direalisasikan melalui berbagai kebijakan keterbukaan informasi publik seperti halnya melalui kebijakan *open data* (data terbuka) yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui portal Jakarta Open Data. Penelitian ini menggunakan teori *open government* dari *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* sebagai teori pendukung untuk mengetahui bagaimana jalannya implementasi portal Jakarta Open Data. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* menjelaskan bahwa dalam menerapkan *open government* harus memuat unsur transparansi dari tindakan pemerintah, tersedianya akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan.

Teori *open government* dari *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* digunakan sebagai teori utama karena DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menjadi salah satu provinsi yang menyelenggarakan *open government* yang direalisasikan melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Teori tersebut digunakan untuk melihat penerapan Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sebagai bagian dari gerakan keterbukaan pemerintah (*open government*) di Provinsi DKI Jakarta yang harus dapat memberikan efek terhadap transparansi dari tindakan pemerintah, tersedianya akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur (Zed, 2013) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk meneliti. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan pencarian jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet menggunakan *Research Gate*, dan *Schoolar*. Selain jurnal juga melakukan studi literatur dari media online. Misalnya saja yang dilakukan peneliti pada tahap awal penulisan dengan menelusuri berita media permasalahan pelayanan publik di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai deskripsi permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) merupakan Aplikasi layanan yang dihasilkan dari penyelenggaraan *open government* di DKI Jakarta. Dalam rangka percepatan penyelenggaraan *open government* di DKI Jakarta dengan membuat Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang menyajikan informasi data pemerintah kepada publik. Hadirnya Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dimulai sejak tahun 2019 sebagai bentuk dari pelaksanaan cita-cita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan satu basis layanan yang akurat, terbuka, dan terintegrasi.

a. Transparansi dari Tindakan Pemerintah

Transparansi dari tindakan pemerintah merupakan setiap tindakan pemerintah yang dapat dicermati oleh publik melalui berbagai informasi terbuka yang disajikan. Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta membentuk Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sebagai bentuk dari transparansi dan harus dapat terbuka secara *default*. Pemerintah secara aktif harus mengumumkan atau mempublikasikan informasi tersebut tanpa diminta. Berdasarkan observasi peneliti, pada Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) pada tahun 2021, menerima 98.177 notifikasi dari warga dengan tingkat penyelesaian 96,49%. Dari 98.177 laporan yang diterima, sebagian besar dilaporkan dalam kategori jalan yaitu 10.724 laporan. Disusul kategori gangguan ketertiban sebanyak 10.182 laporan dan kategori parkir liar sebanyak 8.174 laporan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif mempublikasikan data tanpa melalui mekanisme permohonan atau permintaan terhadap informasi data oleh pengguna Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dengan ketentuan ketersediaan akses *internet* dan sesuai data yang di *input* ke sistem oleh perangkat daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sebagai wujud penyelenggaraan *open government* di Provinsi DKI Jakarta, secara transparansi dari tindakan Pemerintah telah memenuhi penerapan prinsip terbuka.

b. Tersedianya Akses Terhadap Layanan dan Informasi dari Pemerintah

Akses terhadap layanan dan informasi Pemerintah merupakan setiap tindakan pemerintah terhadap akses layanan dan informasi harus dapat menyentuh setiap orang, setiap saat dan dimanapun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sebagai bentuk penyediaan akses layanan dan informasi di DKI Jakarta yang harus dapat tepat waktu dan komprehensif, dapat diakses dan dapat digunakan, serta sebanding dan dapat dioperasikan.

Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam penyediaan akses layanan dan informasi melalui tepat waktu dan komprehensif agar data tetap berharga atau bernilai, karena masih relevan, menyeluruh, dan harus dalam bentuk aslinya tanpa dimodifikasi. Pada Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam fitur Jak-Respon memiliki standar operasional prosedur dalam penyajian data yang menjelaskan secara rinci terkait permasalahan, lokasi kejadian, nomor laporan, tanggal laporan, kategori masalah, status laporan, dan diskusi laporan. Selain itu, Dalam hal publikasi dapat dilakukan dalam waktu sehari jika data sudah masuk ke sistem Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dan sesuai dengan kaidah data terbuka.

Selanjutnya, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam penyediaan akses layanan dan informasi bebas biaya, dengan lisensi terbuka atau tidak perlu izin khusus untuk mengakses dan membukanya. Pengelolaan Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sejak awal dibuat menggunakan sistem *open sources* (sumber terbuka), terdapat fasilitas Lihat Data Informasi, Selain itu, untuk membuka

atau mengunduh data dapat dilakukan secara gratis (bebas biaya) yang memudahkan masyarakat untuk memantau.

c. Ketanggapan Pemerintah Terhadap Ide-Ide Baru, Permintaan dan Kebutuhan

Ketanggapan Pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan merupakan setiap tindakan dari Pemerintah yang dapat membuka ruang partisipasi untuk dapat menciptakan inovasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sebagai bentuk untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, keterlibatan warga negara, pengembangan dan inovasi inklusif melalui penyajian informasi data ke publik. Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sebagai langkah ketanggapan Pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan keterlibatan warga negara karena memiliki kapasitas yang memungkinkan warga negara dan instansi pemerintah lainnya untuk memiliki gagasan yang lebih baik tentang cara memperbaiki layanan publik dan membantu pemerintah untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan kebijakannya Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dibentuk dengan tujuan ke sisi dalam dan ke sisi luar.

Pada sisi ke dalam, hadirnya Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) agar organisasi perangkat daerah dapat membuat kebijakan-kebijakan dengan dasar data konkret di lapangan. Kebijakan yang dihasilkan dari data konkret pada Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dan strategi vaksinasi di DKI Jakarta. Kebijakan yang didasarkan pada bukti data konkret otomatis akan berdampak langsung ke masyarakat.

Selain itu, pada sisi ke luar yakni masyarakat dapat memanfaatkan Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) untuk visualisasi data, infografis data dan sebagainya menjadi salah satu bentuk ruang partisipasi publik dan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) menjadi sarana agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih tanggap dalam merespon masuk-masukan dengan keterlibatan masyarakat

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan terkait dengan pemanfaatan Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) banyak digunakan masyarakat untuk melakukan pelaporan. Penggunaan Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) oleh masyarakat menjadi salah satu bentuk partisipasi publik dan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengambil keputusan maupun kebijakan untuk peningkatan tata kelola Pemerintahan. Hal tersebut menjelaskan bahwa Aplikasi Jakarta

Kini (Jaki) sebagai wujud penyelenggaraan *open government* di DKI Jakarta, secara ketanggapan Pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan telah terpenuhi.

4. Simpulan

Dari segi transparansi dari tindakan pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sudah terbuka secara *default* karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif mempublikasikan data sesuai dengan informasi data yang masuk ke sistem Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang dilakukan oleh perangkat daerah. Selain itu, dalam menjaga data yang bersifat rahasia pengelolaan aplikasi melakukan pengaturan dan pemilahan informasi data pada sistem. Dari segi akses terhadap layanan dan informasi dari Pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) memiliki standar operasional prosedur dalam penyajian data. Selain itu, data yang dapat diakses dengan bebas biaya. Dari segi ketanggapan Pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan keterlibatan warga negara, pengelolaan aplikasi JAKI agar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat kebijakan dengan dasar data konkret di lapangan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan Conflicting Interests

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

References

- Bappenas. 2015. *Laporan Akhir Reviu Implementasi Open Government Indonesia (2011-2014)*. JakaBappenas. 2015. *Laporan Akhir Reviu Implementasi Open Government Indonesia (2011-2014)*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Gant, Jon, and Nicol Tuner-lee. 2011. *Communications Government Transparency: Six Strategies*.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*. 1st ed. Yogyakarta: Gava Media.

Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *electronic government*

Jakarta Smart City. 2022. "Aplikasi JAKI." *JAKARTA.GO.ID*. Retrieved February 17, 2023 (<https://www.jakarta.go.id/aplikasi-jaki>).

Janssen, Marijin, Yannis Charalabidis, and Anneke Zuiderwijk. 2012. "Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Government." *Information Systems Management*.

kumparan.com. 2021. "Pengembangan Super Aplikasi JAKI, Sekarang Sudah Miliki Beragam Fitur." *KumparanNews*. Retrieved February 17, 2023 (<https://kumparan.com/kumparannews/pengembangan-super-aplikasi-jaki-sekarang-sudah-miliki-beragam-fitur-1woZT77YY1J>).

OECD. 2016. *OECD Kajian Open Government - Indonesia Hal-Hal Pokok*. OECD Publishing.

tempo.co. 2020. "Anies Baswedan Bakal Luncurkan Aplikasi Jaki, Ini Fungsinya." *Https://Www.Tempo.Co*. Retrieved February 17, 2023 (<https://metro.tempo.co/read/1295979/anies-baswedan-bakal-luncurkan-aplikasi-jaki-ini-fungsinya>).

Trygu. 2020. *Studi Literatur Problem Based Learning*. Medan: Guepedia.

Tentang Penulis

Analisa Sofiana, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.